

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia secara efektif mulai 1 Januari 2001 hingga saat ini, yang merupakan wujud dari diberlakukannya *new public management* berupa desentralisasi. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan dan mengatur terkait Belanja Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam penelitian (Nugroho & Abdul, 2012), menjelaskan tentang Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penelitian Rondunowu,dkk, (2018) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Fenomena tersebut menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi dari Belanja Modal di suatu daerah. Secara teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempengaruhi terhadap Belanja Modal suatu daerah, namun terkadang peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan anggaran

Belanja Modal suatu daerah karena PAD banyak terserap untuk membiayai belanja lainnya. Dan ada juga PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. namun, pada kenyataannya tidak semua pengeluaran daerah mampu dibiayai dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan perekonomian yang baik. Untuk memenuhi kebijakan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah meningkatkan anggaran keperluan Belanja Modal di kota dan kabupaten Jawa Tengah dan DIY (Rizki, 2018). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik adanya Belanja Modal DIY Yogyakarta nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 336 Miliar, nilai tertinggi sebesar 1.035 Triliun. Dengan hal ini Pemda meningkatkan anggaran Belanja Modal di DIY Yogyakarta tahun 2019 sebesar 1.119 Triliun namun berbanding terbalik dengan realisasi Belanja Modal yang justru mengalami penurunan sebesar 1.035 Triliun. Sedangkan Belanja Modal di Jawa Tengah nilai terendah pada tahun 2019 1.825 Miliar, nilai tertinggi 1.054 Triliun, dengan ini pemerintah daerah meningkatkan anggaran Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar 2.675 Triliun tetapi berbanding terbalik dengan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.267 Triliun Belanja modal mengalami penurunan tidak sesuai dengan dana yang sudah dianggarkan (bps.go.id).

Berdasarkan fenomena diatas dalam melakukan penelitian terhadap Belanja Modal penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus terhadap belanja modal. Penelitian ini merupakan

pengembangan dari penelitian sebelumnya Jemparut, (2017) dengan menambahkan variabel Dana Alokasi Khusus. Selain itu penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi penelitian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sehingga penelitian Belanja Modal masih menjadi topik yang relevan untuk dilakukan penelitian ulang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Retno dan Widiatmoko, 2019). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi kegiatan pengeluaran daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pendapatan asli daerah terdapat ketidakkonsistenan hasil. Hasil penelitian oleh Palupi dan Sulardi, (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan menurut Permana dan Rahardjo, (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Retno dan Widiatmoko, 2019). Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik melalui Belanja Modal daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai Dana Alokasi Umum terdapat ketidakkonsistenan hasil. Penelitian terdahulu yaitu Rohman dkk, (2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang diteliti oleh Sumartini dan Yasa, (2015) bahwa

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Sedangkan menurut Palupi dan Sulardi (2018) menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah dengan prioritas nasional (Retno dan Widiatmoko, 2019). Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas melalui Belanja Modal. Berdasarkan Penelitian terdahulu menurut Azhar dan Suwardi, (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Jayanti, (2020) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dari fenomena dan inkonsistensi penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta** “

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah meningkatkan Belanja Modal di Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta untuk pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah daerah DIY meningkatkan anggaran Belanja Modal sebesar Rp.1.119 Triliun namun berbanding terbalik realisasi Belanja Modal turun menjadi Rp.1.035 T. Sedangkan Pemda Jawa Tengah juga meningkatkan Belanja Modal sebesar 2.675 Triliun tetapi

mengalami penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.267 Triliun (Bps.go.id). Dari rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan simultan terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
2. Menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal.
3. Menguji secara empiris pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal.
4. Menguji secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi umum , dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus pada kota/kabupaten di Jawa Tengah dan DIY tahun 2018 – 2019 apabila PAD dan DAK meningkat maka Belanja Modal juga semakin banyak, sedangkan penelitian ini tidak dapat mengkonfirmasi untuk teori agensi untuk variabel DAU karena Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh pada Belanja Modal

2. Aspek Praktis

a. Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi bagi Pemda dalam membuat rencana anggaran belanja di daerahnya.

b. Pemerintah Pusat

Sebagai bahan referensi bagi pemerintah pusat dalam mengeluarkan kebijakan untuk anggaran di suatu daerah.

c. Masyarakat

Sebagai sarana informasi bagi masyarakat bagaimana pemerintah daerahnya dalam mengelola keuangan untuk pembangunan daerahnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdapat lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat saran – saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian.